

**DAMPAK TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK TERHADAP
KEPERCAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN PASAMAN**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh:

NURHATIKA

19043012/2019

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

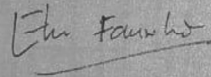
DAMPAK TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK TERHADAP
KEPERCAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN PASAMAN

Nama : Nurhatika
TM/NIM : 2019/19043012
Jenjang Pendidikan : Srata 1 (S1)
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, Oktober 2023

Disetujui Oleh

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak

NIP. 197105222000032001

Pembimbing



Dr. Deviani, SE, Ak, M.Si

NIP. 196906101998022001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

Judul : Dampak Tata Pemerintahan yang Baik Terhadap
Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman.

Nama : Nurhatika

TM/NIM : 2019/19043012

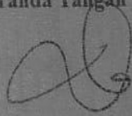
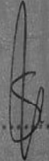
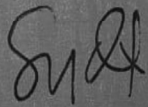
Jurusan : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, Oktober 2023

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Dr. Deviani, SE, Ak, M.Si	
2.	Anggota	Salma Taqwa, SE, M.Si	
3.	Anggota	Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhatika
TM/NIM : 2019/19043012
Tempat/Tanggal Lahir : Simpang, 04 April 1999
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Kp Garagah Koto Jr Sw Laweh
No. Hp/Telp : 0852-8177-9254
Judul Skripsi : Dampak Tata Pemerintahan yang Baik Terhadap Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman.

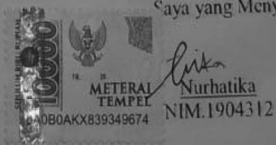
Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Negeri Padang atau di Perguruan Tinggi Lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan, kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dan naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh melalui karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Oktober 2023

Saya yang Menyatakan



ABSTRACK

Nurhatika. (19043012/2019). Dampak Tata Pemerintahan yang Baik Terhadap Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman.

Pembibing : Dr. Deviani, SE. Ak, M.Si

This research aims to find out how much impact good governance has on the trust of the people of Pasaman district. This research uses legitimacy theory. The population of this study was the people of Pasaman district and data collection was carried out using a questionnaire which was distributed directly to 400 people of Pasaman district who were at least 17 years old, had a minimum of high school education, and people who had had dealings with the government. The research results show that 77.4% of good governance variables can influence public trust variables while the rest are influenced by other variables.

Keywords : *Good governance, Citizen trust*

ABSTRACK

Nurhatika. (19043012/2019). Dampak Tata Pemerintahan yang Baik Terhadap Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman.

Pembibing : Dr. Deviani, SE. Ak, M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar dampak *good governance* terhadap kepercayaan masyarakat kabupaten Pasaman. Penelitian ini menggunakan teori legitimasi. Populasi penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Pasaman dan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebarlang langsung kepada 400 masyarakat Kabupaten Pasaman yang berusia minimal 17 tahun, berpendidikan minimal SMA, dan masyarakat yang pernah berurusan dengan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebesar 77,4% variabel *good governance* dapat mempengaruhi variabel kepercayaan masyarakat sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Kata Kunci : *Good Governance*, Kepercayaan Masyarakat

KATA PENGANTAR

Assalamualikum wr.wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat-Nya, yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan serta kesabaran sehingga, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. sholawat dan salam penulis kirimkan untuk Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa nikmat dan cahaya Islam menerangi dunia yang penuh kejahiliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak. Secara khusus peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada orang-orang yang telah berjasa dan membantu selama penyusunan skripsi ini dan memberikan peneliti dukungan baik yang bersifat moral maupun material.

1. Kepada orang tua saya, yakni sosok ayah yang hingga detik ini terus berjuang memberikan yang terbaik untuk putrinya baik secara materi maupun dukungan moral. Kemudian sosok ibu yang telah melahirkan, merawat dan membesarkan saya dengan penuh kasih, cinta dan perjuangan yang luar biasa. Kemudian kepada kakak, abang dan adik tersayang serta seluruh keluarga besar tercinta, terimakasih untuk untaian doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Terimakasih selalu menjadi rumah sebagai tempat pulang paling nyaman.
2. Kepada Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd.,Ph.D selaku rektor Universitas Negeri Padang. Terimakasih untuk segala fasilitas dan kemudahan selama berada dibangku perkuliahan.

3. Kepada Bapak Prof. Prengki Susanto, SE., M.Sc., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Terimakasih untuk kenyamanan fakultas terbaik yang pernah ada.
4. Kepada Ibu Dr. Eka Fauzihardani, SE., M.Si. Ak selaku Ketua Prodi Akuntansi Universitas Negeri Padang sekaligus dosen terbaik saat mengajar penulis selama dibangku perkuliahan.
5. Kepada Ibu Dr. Deviani, SE, Ak, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi peneliti sekaligus dosen favorit dan terbaik yang pernah peneliti temui. Terimakasih atas motivasi, bimbingan dan arahnya Ibu.
6. Kepada Ibu Salma Taqwa, SE, M.Si dan Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, CA, Ph.D selaku Dosen Penelaah dan Penguji peneliti. Terimakasih atas bimbingan dan arahnya Ibu.
7. Kepada Ibu Nelvirita, SE, M.Si. Ak selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus orangtua peneliti selama menempuh pendidikan di Universitas Negeri Padang. Terimakasih arahnya ibu.
8. Terimakasih untuk dosen-dosen dan admin jurusan akuntansi yang telah membantu memudahkan penyelesaian penelitian ini.
9. Untuk kawan-kawan Akuntansi Angkatan 2019 terspesial kelas Akuntansi A. Terimakasih untuk segala keseruan dan kisahya. Perpisahan selalu ada, semoga waktu mengizinkan kita kembali berjumpa dan sukses selalu buat kita.
10. Terimakasih untuk seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kajian Teori	13
1. Teori Legitimasi	13
2. Kepercayaan	16
3. Tata pemerintahan yang baik	19
4. Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik	21
5. Tujuan dan Manfaat Tata Pemerintahan yang baik	23
B. Penelitian Terdahulu	26
C. Pengembangan Hipotesis	31
D. Kerangka Konseptual	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian	38
B. Populasi dan Sampel	38
C. Jenis dan Sumber Data	40
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Variabel Penelitian	41
F. Definisi Operasional	41
G. Pengukuran Variabel	43
H. Teknik Analisis Data	50
1. Uji Kualitas Data	50
2. Uji Asumsi Klasik	51
3. Analisis Deskriptif	52

4. Analisis Linear Berganda.....	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	57
B. Demografi Responden	57
C. Uji Kualitas Data	60
D. Uji Asumsi Klasik	63
E. Analisis Deskriptif.....	66
F. Analisis Linear Berganda	72
G. Pembahasan Hipotesis	78
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Keterbatasan.....	88
C. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Variabel dan pengukurannya	46
Tabel 3.2 Daftar skor jawaban pernyataan berdasarkan sifat.....	49
Tabel 3.3 Tingkat capaian responden	53
Tabel 4.1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.....	58
Tabel 4.2 Karakteristik responden berdasarkan usia	58
Tabel 4.3 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir	59
Tabel 4.4 Hasil uji validitas.....	60
Tabel 4.5 Uji reliabilitas.....	62
Tabel 4.6 Uji Normalitas.....	63
Tabel 4.7 Uji multikolinearitas.....	64
Tabel 4.8 Uji heteroskedastisitas.....	65
Tabel 4.9 Deskriptif akuntabilitas.....	66
Tabel 4.10 Deskriptif transparansi.....	67
Tabel 4.11 Deskriptif aturan hukum	68
Tabel 4.12 Deskriptif daya tanggap	69
Tabel 4.13 Deskriptif kesederhanaan administrasi	70
Tabel 4.14 Deskriptif kepercayaan	71
Tabel 4.15 Uji regresi linear berganda.....	72
Tabel 4.16 Uji koefisien determinasi	75
Tabel 4.17 Uji F.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka konseptual	37
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah di Indonesia sampai saat ini masih terus berpacu untuk meningkatkan kinerjanya, mengingat sampai saat ini kinerja masih menjadi permasalahan yang terus terjadi pada organisasi pemerintah daerah. Belum baiknya kinerja pemerintah di Indonesia tentunya disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya kepercayaan publik yang rendah sebagai dampak dari kualitas tatakelola/*good governance* yang belum baik.

Kepercayaan adalah jenis keyakinan yang diberikan oleh masyarakat daerah kepada pemerintah. Kepercayaan merupakan kondisi dimana masyarakat mau menyerahkan nasibnya kepada para pejabat publik dan pemerintah karena mereka menganggap bahwa pemerintah akan selalu mengurus kepentingan masyarakatnya dengan baik (Dwiyanto, 2011). Kepercayaan publik adalah kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan, pejabat, dan instansi pemerintah (Mayer et al, 1995)

Dwiyanto (2011) kepercayaan masyarakat adalah hal yang harus dikelola yang bersifat sangat dinamis dan bukanlah merupakan suatu hal yang datang dengan sendirinya. Kepercayaan masyarakat akan muncul disaat pelayanan yang diterima dari pemerintah menggambarkan layanan yang benar, bisa diandalkan, dan jujur, yang dapat memenuhi kepentingan masyarakat (Park & Blenkinsopp, 2011).

Nyhan (2000) menjelaskan bahwa kepercayaan publik sebagai harapan positif dari masyarakat (sebagai *trustor*) bahwa birokrasi publik (sebagai *trustee*) memiliki integritas, kompetensi, konsistensi, dan loyalitas sesuai dengan harapan masyarakat. Integritas menunjuk pada birokrat yang jujur dalam bekerja dan bekerja dengan benar. Kompetensi diartikan dengan pengetahuan dan keterampilan baik teknis dan interpersonal yang mendukung atau menunjuk pada keahlian seseorang. Konsistensi berhubungan dengan keandalan, kemampuan memprediksi dan pertimbangan yang baik dalam menangani situasi atau masalah. Konsistensi juga sering dimaknakan sebagai kesesuaian antara kata-kata atau ucapan dan perbuatan serta tindakan. Loyalitas adalah keinginan untuk melindungi atau menyelamatkan orang lain baik secara fisik maupun secara emosional. Dalam arti lain, loyalitas dapat disamakan dengan komitmen dalam pemberian layanan publik yang berkualitas.

Kepercayaan publik (*public trust*) bagi pemerintahan merupakan hal yang sangat penting karena bisa membentuk ikatan masyarakat dengan pemerintah, kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah terjamin, menciptakan legitimasi masyarakat dan bisa menghasilkan modal sosial bagi suatu pemerintahan, dan akan dimanfaatkan sebagai instrumen untuk menghasilkan bantuan sosial dan politik dalam melakukan kegiatan pemerintahan.

Menurut Dwiyanto (2011) krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah antara lain disebabkan oleh berbagai pelayanan yang diberikan

oleh pemerintah kepada masyarakat tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kim (2010) menjelaskan suatu hal yang mendasari publik tidak percaya kepada pemerintah dapat ditimbulkan dari bermacam hal, termasuk kecenderungan masyarakat bahwa pembuat aturan, pemerintah sering menyelewengkan jabatan demi keuntungan mereka sendiri, publik pada umumnya tidak terkait dengan pemerintahan, pelayanan yang dirasakan masyarakat kurang baik, organisasi tidak bekerja dengan baik, melemahnya perdagangan nasional disebabkan karena faktor globalisasi, informasi yang berkembang, krisis atau skandal politik, pemerintahan yang tidak kompeten dll.

Terlepas dari pentingnya suatu kepercayaan warga negara terhadap pemerintahan telah berkurang pada beberapa tahun terakhir ini baik pada negara berkembang maupun maju (Cheema & Popovski, 2010). Menurunnya tingkat kepercayaan publik dan dampaknya yang berbahaya bagi pemerintah (Bo, 2001). Karena tidak adanya kepercayaan masyarakat menjadi tidak puas dengan sistem atau tatanan yang berlaku (Diamond, 2007).

Kepercayaan publik bisa ditingkatkan dengan menerapkan Tata Pemerintahan yang Baik (*good governance*), yang mana merupakan harapan dari setiap masyarakat di dalam pemerintahan. Berkualitasnya suatu pemerintahan bisa menciptakan suatu kehidupan negara yang teratur, dan mewujudkan suatu pemerintahan yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Setiap masyarakat memiliki pola pemikiran yang berbeda

mengenai sebuah pemerintahan. Kehidupan masyarakat yang makmur dapat menjadi suatu penilaian sistem pemerintahan apakah telah dijalankan dengan baik atau belum.

Buruknya citra pemerintahan ditandai dengan adanya tindakan korupsi dan nepotisme. Korupsi merupakan tindakan yang tidak baik yang melanggar kebenaran (Dion, 2010). Perbuatan korupsi biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan untuk keuntungan pribadi atas kekayaan atau status demi kepentingan keluarga, teman, kelompok etnis atau agama. Taghavi *et al* (2011) mengamati bahwa korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk keuntungan pribadi adalah fenomena umum yang berlaku dalam sistem administrasi dan politik di banyak negara. Khan dkk, (2012) menyarankan bahwa negara harus mengembangkan sistem untuk memastikan kredibilitas dengan menghukum pejabat korup yang terlihat jelas. Sedangkan nepotisme mengacu pada pemberian bantuan yang tidak semestinya kepada seseorang yang dekat dengan pejabat pemerintah, seperti anggota keluarga, anggota partai politik, anggota suku atau anggota yang sama, sehingga melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintahan.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Pasaman yaitu di Nagari Languang Rao Utara dimana mantan Wali Nagari Languang Rao Utara tersebut sudah menyelewengkan dana desa tahun 2018-2019. Dari hasil pemeriksaan dan penyidikan tim kejar Pasaman, bahwa yang bersangkutan telah menyalahgunakan kewenangannya atau sengaja

menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi, dimana ada dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 459.000.000. Penahanan terhadap mantan Wali Nagari Languang tersebut merupakan hasil dari penyidikan kasus korupsi penyalahgunaan dana desa pada beberapa kegiatan pembangunan yang dilaksanakan tahun 2018-2019 lalu di nagari itu, dimana ada pekerjaan yang tidak dikerjakan namun dalam pelaporan dikerjakan, dan ada juga yang dikerjakan tidak sempurna namun sudah dinyatakan sempurna/selesai (Novitri Selvia, 7 Oktober 2022).

Ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah bisa juga dilihat dari pelayanan publik yang dilakukan pemerintah dimana proses pelayanan lambat dan memakan waktu lama, serta adanya ketidakpastian harga dan waktu yang membuat masyarakat sulit mendapatkan pelayanan. Hal ini dapat membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemberi layanan, sehingga membuat masyarakat mencari jalan alternatif lain agar mendapatkan layanan dengan cara tertentu, seperti dengan menawarkan biaya tambahan untuk mereka.

Dalam melakukan pemberian layanan kepada masyarakat, selain permasalahan di atas, dimana terdapat pula cara penyelenggaraan pelayanan yang diterima oleh publik yang seringkali merendahkan derajatnya sebagai warga negara. Karena warga diposisikan sebagai klien yang memerlukan bantuan para pejabat, maka mereka wajib mematuhi arahan dan keinginan dari pejabatnya. Hal ini karena budaya pemerintahan

yang muncul selama ini bukanlah budaya pelayanan melainkan budaya yang mengarah pada budaya kekuasaan.

Tuntutan warga akan komponen tata pemerintahan yang baik seperti pelayanan yang berkualitas, perlakuan yang adil terhadap individu, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi merupakan langkah-langkah yang kuat untuk mengurangi korupsi (UNDP, 1997). Diterapkannya *good governance* dapat diyakini bisa memberikan kontribusi dalam meningkatkan pelayanan kepada publik akan semakin baik, berkurangnya korupsi, kepentingan masyarakat akan lebih diperhatikan oleh pemerintah.

Beberapa peneliti sebelumnya telah menunjukkan bahwa praktik *good governance* hal yang fundamental dan berpengaruh dalam meningkatkan kepercayaan publik. Penelitian Beshi & Kaur (2020), Mansoor (2021), dan Yousaf et al (2016) mengemukakan bahwa praktik transparansi, akuntabilitas, daya tanggap, aturan hukum, dan kesederhanaan administrasi memiliki pengaruh secara positif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ini menunjukkan bahwa di tingkat pemerintah daerah penerapan praktik *good governance* perlu dilakukan untuk memastikan bahwa dana yang digunakan sebagaimana seharusnya dan bisa meminimalisir tindak kecurangan pengelolaan dana desa yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Dalam penelitian ini untuk membangun kepercayaan kepada pemerintah, pemerintah harus menerapkan *good governance* sesuai dengan

prinsip transparansi dimana akses informasi yang terbuka dari entitas pemerintah dan menciptakan anggapan bahwa pemerintah bertindak secara legal, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Akuntabilitas dikonseptualisasikan sebagai sejauh mana pemerintah bertanggung jawab atas keputusan dan tindakannya kepada publik (Shafritz., et al 2015). Aturan hukum mengacu pada kerangka hukum yang adil tanpa memihak. Daya tanggap atau ketanggapan yang dirasakan adalah keyakinan bahwa pejabat pemerintah mendengarkan dan peduli dengan apa yang warga katakan (Anderson, 2010) dan perspektif warga negara tentang tata pemerintahan yang baik adalah perbaikan struktur pelayanan publik dan administrasi.

Penelitian Yousaf et al (2016) mengenai dampak tata pemerintahan yang baik terhadap kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah Pakistan dijadikan acuan dalam penelitian ini. Adapun unsur *good governance* yang diteliti terdiri dari akuntabilitas, transparansi, aturan hukum, daya tanggap, dan kesederhanaan administrasi. Penelitian ini penting dilakukan di Indonesia karena terdapat kekurangan penelitian dalam menyelidiki dampak dari kelima unsur *good governance* tersebut secara bersamaan dalam latar budaya Indonesia (Hartanto et al., 2021). Kebanyakan penelitian yang dilakukan di Indonesia hanya meneliti pengaruh dari transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Yousaf et al (2016)

yaitu tempat penelitian yang berbeda serta penggunaan teori legitimasi dalam penelitian ini.

Menurut Deegan et al., (2002) teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi senantiasa berusaha agar kegiatannya sesuai dengan batasan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Menurut Rankin et al. (2017) teori legitimasi digunakan untuk memahami aksi, aktivitas, atau kegiatan pemerintah. Teori legitimasi digunakan karena teori ini mengacu kepada upaya suatu entitas untuk mempertahankan kepercayaan dan dukungan masyarakat dengan cara memenuhi harapan dan ekspektasi masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, upaya untuk memenuhi harapan dan ekspektasi masyarakat dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Ghozali dan Chairiri (2007) yang menjadi dasar dalam teori legitimasi yaitu kontrak sosial antara pemerintah dengan masyarakat, oleh sebab itu teori legitimasi dapat mendukung keberlangsungan hidup pemerintah dengan menitikberatkan pada aktivitas dan kinerja pemerintahan yang baik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di daerah Kabupaten Pasaman, karena di daerah ini diduga terdapat kasus korupsi penyelewengan dana yang dilakukan oleh mantan wali nagari languang pada beberapa kegiatan pembangunan tahun 2018-2019. Adanya kasus korupsi tersebut disebabkan karena masyarakat yang tidak tau terkait informasi dan laporan tentang dana yang diterima dan dikeluarkan, sehingga ini dapat dijadikan

peluang untuk melakukan kecurangan, dimana membuat laporan bahwa ada pekerjaan yang tidak dikerjakan namun dalam pelaporan dikerjakan, dan ada juga yang dikerjakan tidak sempurna namun sudah dinyatakan sempurna/selesai, tindakan ini dapat merugikan masyarakat, sehingga akan menjadi perhatian masyarakat dan membuat kepercayaan masyarakat berkurang terhadap pemerintah, karena masyarakat menganggap bahwa pemerintah menggunakan dana hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.

Berdasarkan penjelasan tersebut pengungkapan informasi dan laporan terkait dana pada pemerintah daerah, khususnya Daerah Kabupaten Pasaman yaitu di Nagari Languang menjadi isu yang cukup urgen untuk diperbaiki, diharapkan dengan adanya tata pemerintahan yang baik terutama yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, aturan hukum, daya tanggap, dan kesederhanaan administrasi, dapat mengembalikan citra positif pemerintah sehingga dapat mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Berkualitasnya suatu pemerintahan bisa menciptakan suatu kehidupan negara yang teratur, dan mewujudkan suatu pemerintahan yang baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, membuat penulis tertarik ingin meneliti tentang “Dampak Tata Pemerintahan yang Baik terhadap Kepercayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah untuk penelitian ini yaitu :

Apakah tata pemerintahan yang baik berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat?

Rumusan diatas diuraikan sebagai berikut :

- a. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat?
- b. Apakah transparansi berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat?
- c. Apakah aturan hukum berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat?
- d. Apakah daya tanggap berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat?
- e. Apakah kesederhanaan administrasi berpengaruh positif terhadap kepercayaan masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui adanya pengaruh positif tata pemerintahan yang baik terhadap kepercayaan masyarakat.

Tujuan diatas diuraikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui adanya pengaruh positif akuntabilitas terhadap kepercayaan masyarakat.
- b. Untuk mengetahui adanya pengaruh positif transparansi terhadap kepercayaan masyarakat.
- c. Untuk mengetahui adanya pengaruh positif aturan hukum terhadap kepercayaan masyarakat.
- d. Untuk mengetahui adanya pengaruh positif daya tanggap terhadap kepercayaan masyarakat.
- e. Untuk mengetahui adanya pengaruh positif kesederhanaan administrasi terhadap kepercayaan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung kepada:

- a. Penulis

Menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam terkhususnya akuntansi sektor publik mengenai tata kelola pemerintahan yang baik. Disamping itu juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Negeri Padang.

- b. Pemerintahan

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang positif bagi pemerintah daerah/kabupaten dalam rangka memberikan dan menyempurnakan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dan yang akan datang.

c. Akademis

Sebagai perbendaharaan kepustakaan dan wawasan pengetahuan yang dapat digunakan pada masa yang akan datang.

d. Peneliti Selanjutnya

Sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian sejenis dan lebih lanjut dalam bidang yang sama.